

BAB I PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara sederhana dapat digolongkan dalam ruang lingkup yang bersifat Umum dan ruang lingkup yang bersifat Khusus. Ruang lingkup secara "Umum" dalam Kedudukannya sebagai Organisasi (*Organisatoris*) Kelembagaan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara historis pertama kali dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTB Nomor 8 Tahun 1978, seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan organisasi telah terjadi perubahan struktur dan yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ruang lingkup tugas dan fungsi yang secara "Khusus" dalam Kedudukan Protokoler pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tercermin pada Pasal 1 angka 1 UU No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK) yang menyatakan pejabat yang berwenang ditingkat Provinsi adalah Gubernur atau "pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan per-Undangan- Undangan Pajak Daerah" dan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pajak Dan Retribusi Daerah, UU No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPDSP) dan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 7 tahun 2008, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, Perencanaan program dan kegiatan bidang pendapatan, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pendapatan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menegaskan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu bagian dari *continuous improvement*, maka setidaknya ada 3 (tiga) hal pokok yang mendapat penyempurnaan, yaitu sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (*Local taxing empowerment*) dan Peningkatan efektifitas pengawasan. Selain mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dipenda Provinsi NTB juga melakukan tugas pokok pemungutan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, sedangkan untuk Pajak Rokok yang juga sebagai salah satu obyek yang kewenangan pemungutannya telah diberikan kepada daerah, akan dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang ini yang telah menetapkan tanggal mulai berlakunya pada 1 Januari 2014.

Pajak Daerah dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan secara *eksponensial*, artinya mengalami peningkatan secara konsisten, hal ini ditandai dengan peningkatan Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah dari tahun 20013 s/d tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini:

Jenis Penerimaan	2013		2014		2015	
	Jml Penerimaan	Pertumbuhan	Jml Penerimaan	Pertumbuhan	Jml Penerimaan	Pertumbuhan
Pajak Daerah	697.834.322.423	20,19	904.782.698.514	29,66	1.010.655.242.476	11,70

Menurunnya Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2015 diakibatkan oleh beberapa hal yaitu dengan terbitnya Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, yang berdampak pada :

1. Menurunnya Nilai Jual Kendaraan Kendaraan Bermotor Tahun 2015.
2. Menurunnya prosentase pengenaan PKB dan BBNKB, khususnya kendaraan bermotor angkutan umum orang dari 60 % Tahun 2014 menjadi 30 % tahun 2015 (Pasal 5 Permendagri 101 Tahun 2014).
3. Menurunnya prosentase pengenaan PKB dan BBNKB , khususnya kendaraan bermotor angkutan umum Barang dari 80 % Tahun 2014 menjadi 50 % tahun 2015 (Pasal 5 Permendagri 101 Tahun 2014).
4. Terhadap point 2 dan 3 diberlakukan untuk kendaraan yang kepemilikannya berbadan hukum (BUMN, BUMD, PT dan Koperasi).

Pajak Daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang

pengelolaannya berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK) dan UU No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPDSP) serta memiliki fungsi anggaran (*fungsi budgeter*), fungsi mengatur (*fungsi regulerend*) dan fungsi investasi dalam penganggaran keuangan daerah, sejatinya sarana dan prasarana pengelolaannya harus terus dioptimalkan dengan berbagai dukungan kebijakan-kebijakan perpajakan daerah, dalam rangka tercapainya sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat yang lebih mandiri, berkesinambungan dan proporsional.

Aspek Stratejik yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, antara lain dipengaruhi oleh **Lingkungan Internal** yang menjadi permasalahan utama (*issue*) yang sedang dihadapi Dipenda dan akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dipenda yaitu Kualitas SDM masih rendah, Belum tersedianya data potensi yang valid, Pelayanan kepada masyarakat WP/WR belum optimal dan Kinerja Birokrasi Pada Umumnya Rendah. Disisi lain permasalahan **Lingkungan Eksternal** berupa Krisis Ekonomi, Gangguan Kamtibmas, Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Tuntutan Masyarakat Terhadap Fasilitas Pelayanan juga membawa dampak terhadap pencapaian kinerja Dipenda dimasa kini.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB No 7 Tahun 2008, terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pajak dan Dana Perimbangan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, serta 12 Seksi/Subbag sedangkan pada 9 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) masing-masing terdiri dari 1 orang Kepala UPTD dan 3 Seksi/Subbag. (Struktur Organisasi Dipenda terlampir).

2. Personalia Dipenda

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh personil sebanyak 316 PNS yang terdiri dari 100 orang tenaga teknis (32,26%) dan 216 orang tenaga Administrasi (67,74%). Jumlah tersebut masih dirasakan perlu penambahan untuk melaksanakan semua kegiatan pokok Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama pada UPTD PPDRD di pulau Sumbawa

Secara rinci jumlah personil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, baik yang berada pada Kantor Induk maupun pada Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah seperti terlampir.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LAKIP ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Data Umum Organisasi
- B. Struktur Organisasi Dan Personalia
- C. Sistematika penyajian

BAB II PRENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategik
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Aspek Strategik
 - 4. Tujuan dan sasaran
 - 5. Cara mencapai tujuan dan sasaran
- B. Rencana Kinerja
 - 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan
 - 2. Sasaran dan Indikator Keberhasilan
- C. Perjanjian Kinerja
 - 1. Kegiatan Yang Akan Ditetapkan

2. Indikator keberhasilan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

- a). Lampiran I : Pengukuran kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah
- b). Lampiran II : Pencapaian Kinerja
- c). Lampiran III : Laporan Pendukung LAKIP
 - (1).Capaian Indikator kinerja RPJMD Prov. NTB Tahun 2009-2013
 - (2).Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian Target RPJMD
 - (3).Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam rangka pencapaian Target RPJMD
 - (4).Informasi lain terkait prestasi SKPD atas nama PEMDA baik nasional/internasional beserta jenis penghargaan yang telah diterima.
- d). Lain-lain Lampiran Pendukung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

1. Visi

Sebagai gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan, selanjutnya akan dijabarkan pada Misi, Program dan kegiatan, maka dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN DAN BERDAYA SAING" (NTB Bersaing)", Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Visi yaitu:

" Menjadi Koordinator Pendapatan Dan Penghimpun Pajak Daerah Yang Proporsional, Berkesinambungan Dan Akuntabel "

Visi ini memberikan gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai masyarakat NTB dan Pemerintahan Daerah melalui kebijakan Umum peningkatan Pendapatan Daerah yaitu :

- a. Memantapkan pengelolaan keuangan Daerah
- b. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu pintu/satu atap
- c. Mendorong peningkatan pengembangan kompetensi bagi aparatur pengelola pendapatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dijabarkan dalam Visi tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merumuskan dan menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DANA DARI PAJAK & DANA PERIMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
- b. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DANA DARI PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH

- c. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DANA DARI RETRIBUSI & PENDAPATAN LAINNYA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH
- d. MENDORONG KELANCARAN & KETERTIBAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
- e. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MATARAM
- f. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH LOMBOK BARAT
- g. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH LOMBOK UTARA
- h. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH LOMBOK TENGAN
- i. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH LOMBOK TIMUR
- j. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH SUMBAWA BARAT
- k. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH SUMBAWA
- l. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH DOMPU
- m. MENDORONG KETERSEDIAAN PENDAPATAN DAERAH BIMA

3. Aspek Strategik

Dari hasil telaahan kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah didapatkan hal-hal sebagai berikut:

a. Lingkungan Internal

Dalam lingkungan internal ada 2 faktor yang berpengaruh yaitu Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan.

1). Faktor Kekuatan

Hal-hal yang menjadi faktor kekuatan disini adalah sebagai berikut :

- a). Tersedianya personil
- b). Tersedianya Dana
- c). Komitmen Dispenda
- d). Memiliki Program Kerja

2). Faktor Kelemahan

Faktor-faktor kelemahan yang ada adalah sebagai berikut:

- a). Kualitas SDM masih rendah
- b). Belum tersedianya data potensi yang valid
- c). Pelayanan kepada masyarakat WP/WR belum optimal.
- d). Kinerja Birokrasi Pada Umumnya Rendah.

b. Lingkungan Eksternal

Dalam lingkungan Eksternal ada 2 faktor yang berpengaruh yaitu Faktor Peluang dan Faktor Ancaman :

1). Faktor Peluang

Yang menjadi Faktor Peluang di sini adalah :

- a). Adanya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, UU No. 14 tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK), UU No 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPDSP) dan Adanya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b). Kemauan Politik Pemda untuk meningkatkan PAD.
- c). Bertambahnya Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
- d). Adanya kesadaran masyarakat sebagai WP/WR.

2). Faktor Ancaman

Yang menjadi Faktor Ancaman disini adalah:

- a). Krisis Ekonomi
- b). Gangguan Kamtibmas
- c). Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah
- d). Tuntutan Masyarakat Terhadap Fasilitas Pelayanan.

4. Tujuan Dan Sasaran

Dalam rencana strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 ini, dengan mengacu pada visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, dirumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut:

a. Tujuan

Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam RPJM maka ditetapkan 15 tujuan yang dirangkum menjadi :

- 1). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
- 2). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM DAN KHUSUS
- 3). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENDAPATAN ROYALTY DAN PINJAMAN DAERAH YANG SAH
- 4). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENDAPATAN PKB DAN BBNKB
- 5). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENDAPATAN PAJAK LAINNYA
- 6). MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGURUSAN KEBERATAN PAJAK & KELUHAN LAINNYA
- 7). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS DARI PENDAPATAN RETRIBUSI
- 8). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENDAPATAN LAINNYA
- 9). MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMBUKUAN DAN KEBERATAN RETRIBUSI PENDAPATAN LAINNYA
- 10). MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM DAN PELAPORAN
- 11). MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI KEUANGAN

- 12). MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- 13). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENATAUSAHAAN PKB DAN BBNKB UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA.
- 14). MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KONTINUITAS PENDAPATAN DARI PKB DAN BBNKB UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA.
- 15). MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA.

b. Sasaran

Dengan mengacu kepada RPJM lebih lanjut ditetapkan 33 sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1). TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG YG MEMADAI
- 2). TERSEDIA NYA TENAGA LAPANGAN YG MEMADAI
- 3). TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG YG MEMADAI
- 4). TERSEDIA NYA TENAGA LAPANG AN YG MEMADAI
- 5). TERSEDIA NYA SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG YG MEMADAI
- 6). TERSEDIA NYA TENAGA LAPANGAN YG MEMADAI
- 7). TERSEDIA NYA SARPRAS PENUNJANG YG MEMADAI
- 8). TERLAKSANANYA OPERASI KENDARAAN BEMOTOR SECARA RUTIN
- 9). TERSEDIA NYA TENAGA LAPANGAN YG MEMADAI
- 10). TERSEDIA NYA SARPRAS PENUNJANG YG MEMADAI
- 11). TERSEDIA NYA TENAGA LAPANGAN YG MEMADAI

- 12). TERSEDIANYA PEDOMAN KERJA YANG LENGKAP
- 13). TERSEDIANYA PETUGAS YG MEMADAI
- 14). TERSEDIANYA SARPRAS PENUNJANG YG MEMADAI
- 15). TERLAKSANANYA OPERASI KENDARAAN BEMOTOR SECARA RUTIN
- 16). TERSEDIANYA TENAGA LAPANGAN YG MEMADAI
- 17). TERSEDIANYA SARPRAS PENUNJANG YG MEMADAI
- 18). TERSEDIANYA TENAGA LAPANGAN YG MEMADAI
- 19). TERSEDIANYA PEDOMAN KERJA YANG LENGKAP
- 20). TERSEDIANYA PETUGAS YG MEMADAI
- 21). TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN YG AKURAT
- 22). TERSUSUNNYA LAPORAN YG LENGKAP
- 23). TERSEDIANYA PUSTAKA DAN DATA YG MEMADAI
- 24). TERSELENGGARA RAKOR
- 25). TERWUJUDNYA TARGET PENERIMAAN DAERAH
- 26). TERWUJUDNYA LAPORAN KEUANGAN YANG BAIK DAN BENAR
- 27). TERLATIHNIA PEGAWAI DALAM DIKLAT PENJENJANGAN DAN FUNGSIONAL
- 28). TERSEDIA DAN TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA KERJA
- 29). TERKIRIMNYA PETUGAS DALAM PERTEMUAN KOORDINASI DAN PERTEMUAN TEKNIS NASIONAL PADA UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA
- 30). TERSUSUNNYA TARGET PENERIMAAN DARI UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA
- 31). TERWUJUDNYA LAPORAN KEUANGAN YANG BAIK DAN BENAR DARI UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA
- 32). TERLATIHNIA PEGAWAI DALAM DIKLAT PENJENJANGAN DAN

FUNGSIONAL PADA UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA.

- 33). TERSEDIA DAN TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA KERJA PADA UPTD PPDRD MATARAM, GERUNG, PRAYA, KLU, SELONG, KSB, SUMBAWA, DOMPU, BIMA

5. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berlandaskan pada dasar-dasar tersebut di atas, maka upaya penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Daerah, dicantumkan pada kebijakan umum peningkatan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA /INSTANSI TERKAIT
- b. KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH, KAB./KOTA
- c. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA /INSTANSI TERKAIT
- d. KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT

Langkah dan upaya – upaya dalam rangka peningkatan PAD, pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui 8 (Delapan) program dan 40 (empatpuluh) *kegiatan* yang pengelolaannya pada 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sebagai unsur pelaksana, dengan masing-masing melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. *Sekretariat*
 - 1). Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2). Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 3). Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 4). Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5). Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
 - 6). Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 7). Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- 8). Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 9). Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 10). Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
 - 11). Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 12). Kegiatan Penyediaan jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
 - 13). Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor
 - 14). Kegiatan pengadaan meubelair
 - 15). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 16). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 17). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - 18). Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 - 19). Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
 - 20). Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - 21). Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Kepegawaian
 - 22). Kegiatan Peningkatan Management Asset/barang Daerah
 - 23). Program Mental dan Fisik Aparatur
 - 24). Penyusunan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 25). Penyusunan Rencana Kerja
 - 26). Kegiatan Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait
 - 27). Sosialisasi Pajak Daerah
 - 28). Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian
 - 29). Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
- b. *Bidang Pajak dan Dana Perimbangan*
- Kegiatan Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan.

c. *Bidang Pajak*

Kegiatan intensifikasi penerimaan pajak daerah dan Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan

d. *Bidang Retribusi dan Pendapatan lainnya*

- 1). Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
- 2). Kegiatan Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL
- 3). Kegiatan Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya
- 4). Kegiatan Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL

e. *Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menjalani kegiatan:*

- 1). Kegiatan Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan
- 2). Kegiatan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor
- 3). Kegiatan Pembangunan gedung kantor
- 4). Selain 3 kegiatan dimaksud, kegiatan yang juga turut dilaksanakan oleh *Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)*, seperti dalam kegiatan sekretariat pada angka 1 sd 17 kecuali kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

a. Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

Rencana Kinerja Tahunan dari Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2015 dibuat berdasarkan program – program yang terdapat dalam Rencana Strategik. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 adalah sebagaimana telah dituangkan dalam Form **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)** terlampir (Lampiran...).

b. Sasaran dan Indikator Keberhasilannya

Masing – masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut dibuatkan indikator kinerja yang terdiri dari unsur; Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome). Sasaran dan Indikator kinerja dari

kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sesuai Form **Pengukuran Kinerja (PK)** terlampir (Lampiran...).

C. PERJANJIAN KINERJA

1. Kegiatan Yang Akan Ditetapkan

Penetapan Kinerja Tahunan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2015 dibuat berdasarkan program – program yang terdapat dalam Rencana Strategik. Kegiatan – kegiatan yang akan ditetapkan pada Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 adalah sesuai dengan Form **Penetapan Kinerja (PK)** terlampir (Lampiran...)

2. Indikator Keberhasilannya

Masing – masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 tersebut dibuatkan indikator kinerja yang terdiri dari unsur; Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome). Sasaran dan Indikator kinerja dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sesuai Form **Capaian Kinerja (PK)** terlampir (Lampiran...).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2015 Capaian Target dan Realisasi PAD 2015 yang dikelola langsung oleh Dispenda.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp. 1.012.540.439.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.026.955.635.533,00 atau 101,42% dengan rincian sebagai berikut :

- PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Denda Pajak

Jenis Pajak	Target 2015	Realisasi 2015	%
1	2	3	4
1 PKB	230.838.000.000	240.153.372.762	104,04
2 BBNKB	335.049.939.200	318.503.154.404	95,06
3 PBBKB	214.277.500.000	227.320.003.266	106,09
4 Pajak Air Permukaan	275.000.000	297.512.060	108,19
5 Pajak Rokok	228.000.000.000	224.381.199.984	98,41
6 Denda Pajak	4.100.000.000	16.300.393.057	397,57
Jumlah	1.012.540.439.200	1.026.955.635.533	101,42

- Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

UPTD PPDRD	Target 2015	Realisasi 2015	%
1	2	3	4
1 Mataram	75.258.498.999	80.839.658.483	107,42
2 Lombok Barat	27.819.720.000	26.960.557.083	96,91
3 Lombok Utara	7.042.047.999	7.505.921.964	106,59
4 Lombok Tengah	31.711.893.999	33.047.934.614	104,21
5 Lombok Timur	34.974.035.001	36.438.729.083	104,19
6 Sumbawa	18.348.591.000	18.786.525.483	102,39
7 Sumbawa Barat	12.691.806.000	12.907.774.534	101,70
8 Dompu	6.547.977.000	6.734.770.347	102,85
9 Bima	16.443.430.002	16.931.501.091	102,97
Jumlah	230.838.000.000	240.153.372.762	104,04

- Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

UPTD PPDRD	Target 2015	Realisasi 2015	%
1	2	3	4
1 Mataram	99.624.986.501	90.937.086.443	91,28
2 Lombok Barat	48.224.587.684	59.523.404.194	123,43
3 Lombok Utara	10.346.712.369		0
4 Lombok Tengah	50.678.266.149	49.155.770.253	97,00
5 Lombok Timur	53.573.343.888	55.653.923.493	103,88
6 Sumbawa	28.525.011.222	23.196.494.871	81,32
7 Sumbawa Barat	13.973.785.437	11.224.477.569	80,33
8 Dompu	9.541.263.951	7.965.436.737	83,48

9	Bima	20.561.982.009	20.846.560.844	101,38
	Jumlah	335.049.939.200	318.503.154.404	95,06

• Pendapatan Denda Pajak

UPTD PPDRD	Target 2015	Realisasi 2015	%
1	2	3	4
Denda PKB			
1 Mataram	1.662.750.400	4.955.808.801	298,05
2 Praya	817.654.300	2.301.299.005	281,45
3 Selong	353.979.000	2.648.444.712	748,19
4 Sumbawa	80.245.500	1.427.620.456	1.779,07
5 Bima	76.405.700	1.276.993.351	1.671,33
6 Dompu	501.857.400	549.907.607	109,57
7 Gerung	72.325.300	1.628.436.452	2.251,54
8 Sumbawa Barat	389.500	565.152.784,40	168.460,28
9 Tanjung	434.392.900	603.325.297	138,89
Jumlah	4.000.000.000	16.047.988.465,40	401,20
Denda BBNKB			
1 Mataram	65.158.600	96.839.553	148,62
2 Praya	929.300	15.602.472	1.678,95
3 Selong	683.800	28.378.484	4.150,11
4 Sumbawa	62.300	20725.679	33.267,54
5 Bima	842.900	23.350.684	2.770,28
6 Dompu	19.376.600	4.707.779	24,30
7 Gerung	33.200	27.027.441	81.407,95
8 Sumbawa Barat	12.913.300	34.908.237,60	270,33
9 Tanjung		864.262	
Jumlah	100.000.000	252.404.591,60	252,40

a. Perbandingan Target Tahun 2015 dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2015.

Target Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2015 sebesar Rp. 3.555.509.042.478 dengan realisasi sebesar Rp. 3.448.535.291.098,91 atau 96,99% dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Pendapatan
1	2	3	4
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	3.555.737.341.478	3.448.582.752.634,75	96,99
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.420.488.693.378	1.372.115.426.320,91	96,60
a) PAJAK DAERAH	1.008.440.439.200	1.010.655.242.476	100,22
b) RETRIBUSI DAERAH	22.920.317.650	24.411.010.301,86	106,50
c) HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	123.837.542.676	63.229.181.808	51,06
d) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	265.290.939.852	273.867.543.270,05	103,23
2 DANA PERIMBANGAN	1.491.849.894.000	1.450.695.264.778	97,24
3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	643.416.208.100	625.724.600.000	97,25
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)	3.555.509.042.478	3.448.535.291.098,91	96,99

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas kelompok Pendapatan :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target sebesar Rp.1.420.471.239.378; realisasi sebesar Rp. 1.372.115.426.320,91 atau 96,60 %,
- b. Dana Perimbangan Rp. 1.491.849.894.000 dengan realisasi Rp1.450.695.264.778 atau 97,24%, dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 643.416.208.100 dengan realisasi Rp 625.724.600.000 atau 97,25%.

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada TA. 2015 PAD ditargetkan sebesar Rp 1.420.471.239.378 dengan realisas Rp. 1.372.115.426.320,91 atau 96,60 % terdiri atas :

- a. Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan, direncanakan sebesar Rp.1.008.440.439.200 dengan realisasi sebesar Rp. 1.010.655.242.476 atau 100,22%.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri atas :

- 1). Retribusi Jasa Umum
- 2). Retribusi Jasa Usaha
- 3). Retribusi Perijinan tertentu

Secara keseluruhan, pendapatan dari retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 22.902.317.650 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 24.411.010.301,86 atau 106,50%.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyertaan modal pada perusahaan daerah yaitu terdiri atas:

- 1). PT. Bank Nusa Tenggara Barat
- 2). PD. BPR LKP
- 3). PT. Gerbang Mas NTB
- 4). PT. Daerah Mandiri Bersaing(DMB)
- 5). PT. Suara Nusa Media Pratama
- 6). PT. Jam Krida
- 7). PT. Asuransi Bangun Askrida

Pada tahun 2015, telah dicapai realisasi sebesar Rp. 123.837.542.676 dari rencana sebesar Rp. 63.229.181.808 atau 51,06 %.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini bersumber dari penerimaan-penerimaan diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2014 Secara keseluruhan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.

265.290.939.852 dengan realisasi sebesar Rp.273.867.453.270,89 atau 103,23%.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2015 direncanakan sebesar Rp.1.491.849.894.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.450.695.264.778 atau 97,24%. Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase sesuai kriteria yang ditetapkan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2015 direncanakan sebesar Rp.188.959.027.000 dengan realisasi sebesar Rp. 147.804.397.778 atau 78,22%.
- b. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada TA. 2015 direncanakan sebesar Rp.1.088.633.717 dengan realisasi sebesar Rp. 1.088.633.717.000 atau 100%.
- c. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA. 2015 direncanakan sebesar Rp.214.257.150.000 dengan realisasi sebesar Rp.214.257.150.000 atau 100%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari dana hibah dan dana penyesuaian, yang secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp.643.416.208.100 dengan realisasi sebesar Rp. 625.714.600.000 atau 97,25%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2014 dengan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2015.

Tabel Pertumbuhan Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah 2014 - 2015.

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian Target (%)	Capaian Realisasi (%)	Capaian Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6=4:2x 100- 100	7=5:3x 100- 100	9=(5-3)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.923.616.362.119	2.805.611.488.056,65	3.555.754.795.478	3.406.647.123.729	21,62	22,92	642.971.264.578
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.194.261.581.800	115.060.397.173,45	1.420.488.693.378	1.372.162.887.856,75	18,94	23,06	257.102.490.683
a) PAJAK DAERAH	963.903.006.800	904.782.698.514	1.008.440.439.200	1.010.655.242.476	4,62	11,70	105.872.543.962
b) RETRIBUSI DAERAH	13.856.478.050	19.838.517.587	22.920.317.650	24.411.010.301,86	65,41	23,05	4.572.492.715
c) HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YANG DIPISAHKAN	93.287.340.000	55.670.166.607	123.837.542.676	63.229.181.808	32,75	13,58	7.559.015.201
d) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	123.214.756.950	134.769.014.465,45	265.290.393.852	273.867.453.270,89	115,31	103,21	139.098.438.805
2 DANA PERIMBANGAN	1.226.208.396.981	1.212.086.447.141	1.491.849.894.000	1.450.695.264.778	21,66	19,69	238.608.817.637
3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	503.146.383.338	478.464.643.742,20	643.416.208.100	625.724.600.000	65,28	58,44	147.259.956.258
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)	2.923.616.362.119	2.805.611.488.056,65	3.555.754.795.478	3.406.647.123.729	21,62	22,92	642.971.264.578

Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp 3.406.647.123.729. Realisasi ini meningkat sebesar Rp. 642.971.264.578 atau 22,92% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2014 sejumlah Rp 2.805.611.488.056,65. Target pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 3.555.509.042.478 Target ini meningkat sebesar Rp. 632.138.436.359 atau 21,62 % dari target tahun 2014 sebesar Rp.,-.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi PAD pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.372.162.887.856,75 meningkat sebesar Rp 257.102.490.683 atau 18,94% dari Realisasi tahun 2014 sebesar Rp. 115.060.397.173,45. Adapun Realisasi setiap komponen Pendapat Asli Daerah diuraikan antara lain:

- 1). Pajak Daerah. Realisasi pajak daerah tahun 2015 Rp.1.010.242.476 meningkat sebesar Rp. 105.872.543.962 atau 11,70% dari Realisasi pajak daerah tahun 2014 sebesar Rp. 904.782.698.514 Pendapatan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
- 2). Realisasi Retribusi Daerah tahun 2015 Rp. 24.411.010.301,86 meningkat sebesar Rp. 4.839.129.663 atau 23,05% dari Realisasi Retribusi Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 19.838.517.587. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3). Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2015 Rp. 63.229.181.808 meningkat sebesar Rp. 7.559.015.201 atau 13,58% dari Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2014 sebesar Rp. 55.670.166.607. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.
- 4). Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 Rp.273.867.453.270,89 meningkat sebesar Rp. 137.098.438.805 atau 103,21% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 134.769.014.465,25. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda

Retribusi, Pendapatan Dari Pengembalian dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

b. Dana Perimbangan.

Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.450.695.264.778 meningkat sebesar Rp. 238.608.817.637 atau 19,69% dari Realisasi Dana Perimbangan tahun 2014 sebesar Rp. 1.212.086.447.141. Adapun Pendapat Dana Perimbangan terdiri antara lain Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2015 sebesar Rp. 625.724.600.000 meningkat sebesar Rp. 147.259.956.258 atau 58,44% dari Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2014 sebesar Rp. 478.464.643.742,20. Adapun Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Jenis Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja pendapatan Tahun 2015 dengan Target Kinerja Jangka Menengah.

Tabel perbandingan Th 2015 dg Th 2018

No	SASARAN (JENIS PENDAPATAN)	Satuan	TARGET TH 2015	REALISASI TH 2015	PERBANDINGAN TARGET TH 2015 DENGAN TARGET 2018	CAPAIAN TAHUN 2015 TERHADAP Target Tahun 2018	Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra)
1	2	3	4	5	6=4:8x100%	7=5:8x100%	8
	PENDAPATAN DAERAH	(%)	3.555.754.795.478	3.448.582.752.634,75	0,83	0,80	4.287.776.894.000,00
I	PAD	(%)	1.008.440.439.200	1.372.162.887.856,75	0,81	0,78	1.762.840.194.000,00
II	DANA PERIMBANGAN	(%)	1.491.849.894.000	1.450.695.264.778	0,82	0,82	1.829.091.365.000,00
III	LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	(%)	643.187.909.100	625.724.600.000	0,92	0,92	695.845.335.000,00
	Total Pendapatan Daerah	(%)	3.555.754.795.478	3.448.582.752.634,75	0,83	0,80	4.287.776.894.000,00

Perbandingan Realisasi pendapatan Daerah Tahun 2015 dengan Target akhir Jangka Menengah 2018 mengalami pencapaian kinerja secara eksponensial, artinya mengalami peningkatan secara konsisten bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB sejumlah Rp 3.448.582.752.634,75. Realisasi ini mengalami pencapaian 0,80 % dibandingkan dengan Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda) sejumlah Rp 4.287.776.894.000,00-. Target pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 3.555.754.795.478,00 Target ini menunjukkan pencapaian positif 0,83 % dari Target Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda) sebesar Rp. 4.287.776.894.000,00,-. Perbandingan pendapatan daerah Tahun 2015 dengan 2018 dimaksud terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Adapun kelompok Pendapatan berkenaan diuraikan antara lain:

LAKSANA PADANTBTA. 2015

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi PAD pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.372.162.887.856,75 mengalami pencapaian realisasi 0,78% dari Target PAD Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda) sebesar Rp. 1.762.840.194.000,00. Adapun sumber Pendapat PAD terdiri dari jenis pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Dana Perimbangan.
Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.450.695.264.778,00 mengalami pencapaian realisasi 0,79% dari Target Dana Perimbangan Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda) sebesar Rp. 1.829.091.365.000,00. Adapun sumber Pendapat Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2015 sebesar Rp. 625.724.600.000 mengalami pencapaian 0,90% dari Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 (Target Akhir RPJMD/Renstra Dipenda) sebesar Rp. 695.845.335.000,00. Adapun Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Jenis Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja, Alternatif Dan Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam usaha peningkatan pendapatan daerah, perbandingan antara capaian kinerja dengan beberapa kinerja yang ditargetkan masih ditemui adanya gap-gap antara capaian dan target. Kesenjangan ini sesungguhnya adalah isu dan masalah yang harus dipecahkan pada masa mendatang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan Tabel dan beberapa analisis uraian di atas antara lain:

- a. Relatif rendahnya pendanaan untuk mendukung sarana penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi belum secara optimal dikelola.
- c. Standar Kinerja & Standar Kompetensi Aparatur/Pegawai, serta kuantitas (jumlah) yang mampu mendukung pekerjaan teknis operasional pengelolaan PAD sesuai dengan TUPOKSI masing-masing masih belum tersedia secara memadai.
- d. WP masih belum sepenuhnya menyadari kewajiban Perpajakannya, yang dapat dilihat dari masih terdapatnya sebagian WP yg tidak atau terlambat melakukan daftar ulang (DU).

- e. Kondisi perkembangan sosial & ekonomi serta keamanan khususnya di Provinsi NTB yang berpengaruh terhadap tingkat Pendapatan WP yang berimplikasi pada tingkat Pendapatan PAD.
- f. Kebijakan pusat tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sering mengalami perubahan.
- g. Kebijakan pusat tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Fluktuatif.
- h. Kebijakan Otonomi Daerah Belum Sepenuhnya Didukung Oleh Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- i. Adanya perbedaan Asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- j. Kebutuhan Daerah Tidak Sebanding Dengan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Yang Ada, Karena Potensi Masing-Masing Daerah Sebagian Besar Dikelola Oleh Pusat.
- k. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagaimana Untuk mengatasi Permasalahan tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

- a. Meningkatkan kemampuan analisa sumber-sumber retribusi dan Pajak.
- b. Mengupayakan secara bertahap ketersediaan sarana pendukung penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Penerapan reward and punishment bagi petugas dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Pusat.
- e. Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
- g. Optimalisasi / Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah sebagai sumber PAD.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan PAD antara lain :

- a. Melakukan penyempurnaan sistem aplikasi Samsat Online Pajak Daerah.
- b. Melakukan revisi Peraturan Daerah tarif Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
- c. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah .
- d. Melaksanakan rapat koordinasi /evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
- e. Melaksanakan operasi gabungan untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
- f. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- g. Melakukan sosialisasi pemungutan Pajak Daerah kepada wajib pajak/masyarakat melalui Media Elektronik dan media lainnya.
- h. Pada Tahun 2015, telah dilaksanakan pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan oprasional samsat keliling.
- i. Untuk mempercepat proses pembayaran PKB telah menambah unit pelayanan dengan sistem Drive Thru untuk pengesahan setiap tahunnya hanya dengan menunjukkan KTP dan STNK serta Notice Pajak. Pada tahun 2015 dibangun tambahan pelayanan Drive Thru yang berlokasi di paok motong Lotim.

Dari beberapa paparan di atas, dalam upaya mencapai tujuannya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga melakukan terobosan-terobosan yang bersifat inovatif, yaitu :

- a. Melakukan penyempurnaan pelayanan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dari manual ke sistem komputerisasi (online) di seluruh UPTD PPDRD se NTB

- b. Melakukan Samsat keliling untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak yang jauh dari lokasi samsat
- c. Mendirikan Drive Thru untuk Wajib Pajak yang bekerja pada jam sibuk.
- d. Mendirikan Samsat weekend yang melayani wajib pajak setiap hari kerja dari pukul 17.00 sampai dengan 21.00 wita.
- e. Melakukan sosialisasi pungutan pajak Kendaraan bermotor bekerjasama dengan Pemda kab/Kota
- f. Melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Pajak, Kanwil Perbendaharaan dengan Pemda kab/Kota se NTB berkaitan dengan PBB dan BPHTB

Dalam implementasi terobosan inovatif diatas, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB selaku eksekutor kebijakan pengelolaan pendapatan daerah banyak menemui permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih tergolong rendah
- b. Belum falidnya data potensi obyek Pajak Kendaraan Bermotor, terutama data kendaraan lama.
- c. Adanya Sengketa pajak dengan WP (pihak PT. Newmont NNT).
- d. Belum terpenuhinya Sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Masih rendahnya SDM yang menguasai teknologi program komputer
- f. Belum maksimalnya pemakaian kekayaan daerah, terutama asrama/aula dan tempat penginapan.
- g. Belum dilakukannya pemutahiran data potensi Retribusi Daerah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas, beberapa langkah telah diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat Wajib Pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tepat waktu.
- b. Melaksanakan peremajaan/pemutahiran data kendaraan bermotor.

- c. Membentuk tim advokasi yg terdiri dari unsur Dispenda, Biro Hukum dan Pengacara dlm upaya menangani sengketa Pajak dg PT. NNT di Pengadilan Pajak
- d. Memenuhi beberapa sarana dan prasarana yang menjadi prioritas peningkatan pelayanan.
- e. Memberikan kesempatan kepada staf untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan

Langkah rekomendasi yang ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah:

- a. Pembenahan / upgrade program On Line System antar Samsat se NTB.
- b. Pengawasan, penerapan pelayanan dengan sistem FIFO (First In First Out) yang pertama masuk dan pertama keluar dengan waktu yang cepat dan tepat.
- c. Memberikan keringanan kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak PKB dan BBNKB melalui Pergub No.16 tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor mutasi dari luar daerah.
- d. melaksanakan pemutahiran data obyek Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB yang valid.
- e. Meningkatkan frekwensi OPGAB dalam rangka Law Inforcment dan menjaring kendaraan luar daerah yang beroperasi diwilayah NTB lebih dari 3 bulan secara berturut-turut.
- f. Pembangunan unit layanan di Paok Motong Lotim untuk mendekatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- g. Meningkatkan Etos dan budaya kerja dengan meningkatkan capacity building pegawai dan melaksanakan PP 53 secara konsekuen

- h. Melakukan pembahasan terhadap Raperda Retribusi dengan pihak legislatif.

F. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan

a Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan¹

Efisiensi anggaran pendapatan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima/ yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait efisiensi anggaran dibuat kategori atas beberapa nilai dari perhitungan rasio efisiensi. Jika rasio efisiensi < 10% maka dinilai sangat efisien, jika rasio efisiensi antara 10%20% maka dinilai efisien, jika rasio efisiensi antara 21%30% maka dinilai cukup efisien, jika rasio efisiensi antara 31%40% maka dinilai kurang efisien dan jika rasio efisiensi > 40% maka dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin baik dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan penyusunan besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tahun 2015 Triwulan I s/d IV	Biaya Pemeroleh Pendapatan		Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Hasil Analisis Efisiensi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
Total Anggaran Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung dan Total Realisasi Pendapatan Daerah	76.060.557.966,00	70.758.622.338,00	3.448.582.752.634,75	6,89	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan I	15.737.428.077,00	13.208.409.634,00	616.788.769.430	5,87	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan II	19.838.364.291,00	14.694.485.829,00	818.877.077.958,69	5,01	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan III	18.145.279.609,00	20.579.572.242,00	1.271.791.051.819,09	7,87	Sangat efisien
Anggaran Belanja Triwulan IV	22.309.485.988,00	22.276.154.633,00	741.125.853.426,97	9,01	Sangat efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Daerah	76.060.557.966,00	70.758.622.338,00	1.420.471.239.378	6,89	Sangat efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan PAD	76.060.557.966,00	70.758.622.338,00	1.008.440.439.200	5,32	Sangat efisien

Sumber data: Hasil Pengumpulan data kinerja tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2015, triwulan I s/d triwulan IV.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa Rasio efisiensi anggaran pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I tahun 2015 **5,87% (Sangat Efisien)** mengalami penurunan positif 0,86% dibandingkan dengan rasio efisiensi anggaran pendapatan Pada triwulan II Tahun Anggaran 2015 sebesar **5,01% (Sangat Efisien)**. Rasio efisiensi anggaran pendapatan Pada triwulan III Tahun Anggaran 2015 sebesar **7,87% (Sangat Efisien)** dan menggambarkan adanya peningkatan penganggaran (2,85%) dibandingkan dengan rasio efisiensi anggaran pendapatan Pada triwulan II Tahun Anggaran 2015, sedangkan Pada triwulan IV Tahun Anggaran 2015 sebesar **9,01% (Sangat Efisien)** kembali mengalami peningkatan penggunaan anggaran hingga **1,14%** dibandingkan dengan rasio efisiensi anggaran pendapatan Pada Tahun Anggaran 2015 triwulan III **7,87%**. Jenis Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 dimaksud terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Denda Pajak.

Dari Total Anggaran Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Untuk Memperoleh Pendapatan Pajak Daerah, rasio efisiensi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **6,89%, (Sangat Efisien)** sedangkan bila diperhitungkan rasio efisiensi Untuk Memperoleh Pendapatan PAD **5,32%** yang berarti Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai **Sangat Efisien** dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah karena dengan teliti dan cermat telah memperhitungkan estimasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya.

b Analisis Efektivitas Pendapatan²

Efektivitas kinerja Pendapatan yang dapat ditunjukkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggambarkan kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dikategorikan atas beberapa nilai hasil perhitungan rasio efektivitas. Jika rasio efektivitas > 100% maka dinilai sangat efektif, jika rasio efektivitas 100% maka dinilai efektif, jika rasio efektivitas antara 90%-99% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektivitas antara 75%-89% maka dinilai kurang efektif dan jika rasio efektivitas < 75% maka dinilai tidak efektif. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin baik. Perhitungan efektivitas pendapatan pada table berikut ini :

LAKIP DIPENDA NTB TA. 2015

Kelompok & Jenis Pendapatan Daerah	Target 2015	Realisasi 2015	Rasio Efektivitas %	Hasil Analisis Efektivitas
I	II	III	IV	V
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	3.555.754.795.478	3.448.582.752.634,75	96,99	Cukup efektif
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.420.471.239.378	1.372.162.887.856,75	96,60	Cukup efektif
a) PAJAK DAERAH	1.008.440.439.200	1.010.655.242.476	100,22	sangat efektif
b) RETRIBUSI DAERAH	22.902.317.650	24.411.010.301,86	106,50	sangat efektif
c) HSL PENGELOLAAN KEKAYAAN DRH YG DIPISAHKAN	123.837.542.676	63.229.181.808	51,06	Tidak efektif
d) LAIN-LAIN PAD YANG SAH	265.290.939.852	273.867.453.270,89	103,23	Cukup efektif
2 DANA PERIMBANGAN	1.491.849.894.000	1.450.695.264.778	97,24	Cukup efektif
3 LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	643.416.208.100	625.724.600.000	97,25	Cukup efektif
Jumlah (1+2+3) = (Realisasi : Target x 100%)	3.555.754.795.478	3.448.582.752.634,75	96,99	Cukup efektif

Dari Tabel di atas diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 adalah 96,99 % yang berarti Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi Cukup efektif. Hal ini disebabkan karena total prosentase realisasi anggaran pendapatan Daerah berada pada rasio efektifitas antara 90-99% atau masih lebih kecil dari target anggaran pendapatan Daerah yang ditetapkan. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2015 dimaksud terdiri atas Rasio efektivitas kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) 96,99 %, Dana Perimbangan 97,24 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 97,25 %. Berdasarkan Hasil Analisis Efektivitas, 3 (tiga) kelompok Pendapatan Daerah dimaksud dapat dikategorikan Cukup efektif. Hal ini disebabkan total realisasi anggaran dari 3 (tiga) kelompok Pendapatan Daerah masih lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2015 rasio efektivitas rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari jenis Pendapatan:

- 1) Pajak Daerah dengan Rasio Efektivitas 100,22 % atau dalam kategori sangat efektif. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan Pajak Daerah lebih besar dari target pendapatan Pajak Daerah.
- 2) Retribusi Daerah Rasio Efektivitasnya 106,50 % atau dalam kategori Sangat efektif. Sangat efektifnya Retribusi Daerah dipengaruhi oleh tingginya realisasi pendapatan retribusi jasa umum rincian retribusi pelayanan kesehatan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rasio Efektivitasnya 51,06 % atau dalam kategori Tidak efektif.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rasio Efektivitasnya 103,23 % atau dalam kategori Cukup efektif.

Rasio Efektivitas dengan kategori capaian tidak efektif dari jenis pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal pada pengelola pendapatan tersebut.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
	Penyediaan jasa keamanan kantor
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Pembangunan gedung kantor
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	Pengadaan meubelair
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan pelatihan formal
	Pembinaan mental dan fisik aparatur
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5	Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah
	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan
	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor
	Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan
	Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL
	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL

	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya
	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL
	Sosialisasi Pajak Daerah
	Aplikasi Retribusi dan PPL
7	Program Reformasi Birokrasi
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian
8	Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset
	Peningkatan Management Asset/barang Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Dari total anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Tahun 2015 yaitu Rp. 76.030.557.966,00__.- tidak dapat direalisasikan 100%. Realisasi keuangan Tahun 2015 pada Dinas Pendapatan diuraikan sebagai berikut :

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Target	:	76.030.557.966,00
Realisasi	:	70.758.622.338,00
Efisiensi Anggaran	:	5.271.935.628,00

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Target	:	52.387.358.506,00
Realisasi	:	49.274.465.203,00
Efisiensi Anggaran	:	3.112.893.303,00

2. BELANJA LANGSUNG

Target	:	23.643.199.460,00
Realisasi	:	21.484.157.135,00
Efisiensi Anggaran	:	2.159.042.325,00

Sebaran alokasi dana pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
1.	Induk	62.038.097.879	57.668.791.778	92,96	4.369.306.101
2.	Mataram	1.646.395.562	1.443.183.882	87,66	203.211.680
3.	Gerung	1.915.907.875	717.396.966	93,52	64.693.659
4.	Praya	1.635.898.550	1.544.902.008	94,44	90.996.542
5.	Tanjung	1.205.762.250	1.148.591.569	92,33	57.170.681
6.	Selong	1.717.491.000	1.581.738.151	92,10	135.752.849

7.	Sumbawa Barat	1.230.609.660	1.162.437.446	94,46	68.172.214
8.	Sumbawa	1.681.173.570	1.611.414.369	95,85	69.759.201
9.	Dompu	1.253.546.750	1.190.312.295	94,96	63.234.455
10.	Bima	1.705.674.870	1.572.168.140	92,17	133.506.730
Jumlah		76.030.557.966	70.758.622.338	93,07	70.758.622.338

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 76.030.557.966,00,- realisasinya sebesar Rp. 70.758.622.338,00,- atau sekitar **93,07%**. Realisasi keuangan untuk masing – masing kegiatan diuraikan antara lain:

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	Realisasi	Capaian %	EFISIENSI ANGGARAN (Rp)
	DINAS PENDAPATAN DAERAH	76.030.557.966,00	70.758.622.338,00	93,07	5.271.935.628,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	52.387.358.506,00	49.274.465.203,00	94,06	3.112.893.303,00
	BELANJA LANGSUNG	23.643.199.460,00	21.484.157.135,00	90,87	2.159.042.325,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.787.920.500,00	8.673.053.427,00	88,61	1.114.867.073,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	79.498.000,00	74.075.493,00	93,18	5.422.507,00
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	2.073.134.628,00	1.567.464.092,00	75,61	505.670.536,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	551.976.000,00	533.700.000,00	96,69	18.276.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.596.000.000,00	1.594.358.000,00	99,90	1.642.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	537.377.362,00	527.086.855,00	98,09	10.290.507,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.110.880.800,00	960.181.250,00	86,43	150.699.550,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	92.432.900,00	84.106.400,00	90,99	8.326.500,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.916.631.800,00	1.608.943.200,00	83,95	307.688.600,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	46.584.000,00	42.936.000,00	92,17	3.648.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	261.140.000,00	207.796.750,00	79,57	53.343.250,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	375.325.010,00	361.533.187,00	96,33	13.791.823,00
	Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	325.000.000,00	300.300.000,00	92,40	24.700.000,00
	Penyediaan jasa		810.572.200,00		

	keamanan kantor	821.940.000,00		98,62	11.367.800,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	6.195.239.920,00	5.803.338.362,00	93,67	391.901.558,00
	Pembangunan gedung kantor	2.613.719.000,00	2.546.541.100,00	97,43	67.177.900,00
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	980.550.000,00	850.928.600,00	86,78	129.621.400,00
	Pengadaan meubelair	475.804.000,00	454.644.000,00	95,55	21.160.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	657.400.000,00	620.128.560,00	94,33	37.271.440,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.057.166.920,00	943.040.378,00	89,20	114.126.542,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	179.100.000,00	164.098.624,00	91,62	15.001.376,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	231.500.000,00	223.957.100,00	96,74	7.542.900,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	252.344.000,00	194.477.300,00	77,07	57.866.700,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	106.794.000,00	59.947.300,00	56,13	46.846.700,00
	Pembinaan mental dan fisik aparatur	145.550.000,00	134.530.000,00	92,43	11.020.000,00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	220.769.000,00	188.008.000,00	85,16	32.761.000,00
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	62.850.000,00	39.685.000,00	63,14	23.165.000,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	68.150.000,00	66.149.000,00	97,06	2.001.000,00
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	89.769.000,00	82.174.000,00	91,54	7.595.000,00
5	Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	165.248.000,00	147.317.000,00	89,15	17.931.000,00
	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	165.248.000,00	147.317.000,00	89,15	17.931.000,00
6	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.760.618.040,00	6.232.582.507,00	92,19	528.035.533,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	81.250.000,00	69.854.000,00	85,97	11.396.000,00
	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	3.175.907.000,00	2.906.670.670,00	91,52	269.236.330,00

	Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan	831.324.440,00	726.211.741,00	87,36	105.112.699,00
	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	1.261.680.000,00	1.222.021.000,00	96,86	39.659.000,00
	Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	343.622.400,00	334.347.520,00	97,30	9.274.880,00
	Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait	250.933.700,00	208.666.450,00	83,16	42.267.250,00
	Koordinasai dan Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	52.220.000,00	48.686.000,00	93,23	3.534.000,00
	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	55.000.000,00	53.643.800,00	97,53	1.356.200,00
	Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	224.490.500,00	205.654.400,00	91,61	18.836.100,00
	Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PLL	30.000.000,00	29.250.926,00	97,50	749.074,00
	Sosialisasi Pajak Daerah	346.000.000,00	338.140.000,00	97,73	7.860.000,00
	Aplikasi Retribusi dan PPL	108.190.000,00	89.436.000,00	82,67	18.754.000,00
7	Program Reformasi Birokrasi	203.860.000,00	200.450.539,00	98,33	3.409.461,00
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	203.860.000,00	200.450.539,00	98,33	3.409.461,00
8	Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	57.200.000,00	44.930.000,00	78,55	12.270.000,00
	Peningkatan Management Asset/barang Daerah	57.200.000,00	44.930.000,00	78,55	12.270.000,00

1. Metode Pengukuran Kinerja Beserta Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi *)}}{\text{Rencana **)}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana** - (Realisasi * - Rencana**)}}{\text{Rencana **)}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimates outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Nilai Pengukuran Skala Ordinal		Uraian Capaian Kinerja
1.	85 s.d 100	:	Sangat Berhasil
2.	$70 \leq \text{s.d} < 85$	:	Berhasil
3.	$55 \leq \text{s.d} < 70$	:	Cukup Berhasil
4.	< 55	:	Tidak berhasil

Hasil pengukuran kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan metode pengukuran kinerja dan baru dapat dihitung setelah berakhirnya suatu kegiatan dilaksanakan dengan indikator kinerja yang terdiri dari indicator inputs, outputs, dan outcomes, dengan melihat manfaat dan dampak terhadap kehidupan sosial dari berbagai aspek.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan metode pengukuran, tingkat capaian indikator kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	Nilai Capaian %	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,61	Sangat Berhasil
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93,67	Sangat Berhasil
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77,07	Berhasil
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85,16	Sangat Berhasil
5.	Program peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	89,15	Sangat Berhasil
6.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	92,19	Sangat Berhasil
7.	Program Reformasi Birokrasi	98,33	Sangat Berhasil
8.	Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	78,55	Berhasil

Dari delapan sasaran yang dilakukan pengukuran kinerjanya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut dalam table di bawah ini:

No.	Nama Klasifikasi Capaian	Jumlah Klasifikasi Capaian Sasaran Setrategis/Program	Jumlah Nilai Capaian (%)
1.	Sangat Berhasil	6	547,11
2.	Berhasil	2	155,62
3.	Cukup Berhasil	0	
4.	Tidak Berhasil	0	
Jumlah		8	702,73

Hasil pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode pengukuran kinerja seperti terlampir. Tingkat capaian indikator kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015 dari 8 (delapan) Program yang dilaksanakan 6 (enam) Program dinyatakan *Sangat Berhasil*, 2 (dua) Program dinyatakan *Berhasil* dan tidak ada Program dinyatakan *Cukup Berhasil* ataupun Program yang dinyatakan *tidak berhasil*, Sehingga hasil dari pengukuran kinerja kegiatan selama tahun 2015 adalah :

$$= 702,73 \% : 8 = 87,84 \% \text{ (Sangat Berhasil).}$$

Berdasarkan hasil perhitungan **87,84 %** dapat diketahui Efisiensi Belanja dengan menggunakan rasio efisiensi belanja dengan cara membandingkan belanja dengan anggaran belanja. Belanja mencapai efisien apabila rasio efisiensi $< 100 \%$. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penghematan anggaran belanja akan semakin baik. Singkatnya pada tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah efisien menggunakan anggaran belanja, terlihat dari hasil rasio efisiensi di tahun 2015 adalah **87,84%**, dihubungkan dengan persentase tersebut berarti Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 dapat dinilai bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.

2. Uraian Capaian Masing-Masing Program Dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Penyediaan jasa surat menyurat Dengan jumlah dana sebesar Rp. 79.498.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 74.075.493,00 atau 93,18 %.*

-  Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat
-  Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan surat – menyurat
-  Indikator Benefit adalah Meningkatnya kemudahan pelayanan surat – menyurat
-  Indikator Impact adalah Terwujudnya Tertib pelayanan surat menyurat

- 2). *Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.073.134.628,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.567.464.092,00 atau 75,61%*

-  Indikator Output adalah Terlaksananya kebutuhan komunikasi, air bersih dan penerangan kantor

- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya komunikasi untuk kelancaran tugas
- ✚ Indikator Benefit adalah terwujudnya koordinasi dinas pendapatan dengan instansi terkait
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya pendapatan asli daerah

3). *Penyediaan jasa administrasi keuangan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 551.976.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 533.700.000,00 atau 96,69 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya tertib administrasi keuangan
- ✚ Indikator Benefit adalah Terlaksananya administrasi keuangan

LAKIP  Indikator Impact adalah Meningkatnya tertib administrasi keuangan

4). *Penyediaan jasa kebersihan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.596.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.594.358.000,00 atau 99,90 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya administrasi perkantoran
- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebersihan kantor
- ✚ Indikator Benefit adalah Pelaksanaan kebersihan tercapai
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya kebersihan kantor

5). *Penyediaan alat tulis kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 537.377.362,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 527.086.855,00 atau 98,09 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan aparatur
- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan aparatur

- ✚ Indikator Benefit adalah Pelaksanaan kegiatan lancar
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya tertib administrasi pelayanan aparatur

6). *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.110.880.800,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 960.181.250,00 atau 86,43 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi
- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan administrasi
- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan administrasi
- ✚ Indikator Impact adalah Tertibnya pelayanan administrasi

7). *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 92.432.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 84.106.400,00 atau 90,99 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi
- ✚ Indikator Outcome adalah Terciptanya kenyamanan bekerja
- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan administrasi
- ✚ Indikator Impact adalah Tertibnya pelayanan administrasi

8). *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.916631.800,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.608.943.200,00 atau 83,95 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor
- ✚ Indikator Outcome adalah Terciptanya fasilitas kantor
- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya sarana kerja yang efektif

- ✚ Indikator Impact adalah Suasana kerja yang nyaman
- 9). *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 46.584.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 42.936.000,00 atau 92,17 %*
- ✚ Indikator Output adalah Buku, majalah literatur / referensi peraturan Per Undang – undangan
- ✚ Indikator Outcome adalah Meningkatnya pengetahuan tentang informasi dan peraturan Perundang – undangan
- ✚ Indikator Benefit adalah Memperluas wawasan dan mengetahui peraturan per Undang - undangan terutama masalah keuangan
- ✚ Indikator Impact adalah Dengan memahami aturan perundang - undangan yang dinamis terwujudlah peningkatan PAD

10). *Penyediaan makanan dan minuman Dengan jumlah dana sebesar Rp. 261.140.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 207.796.750,00 atau 79,57 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya penyediaan makan dan minum
- ✚ Indikator Outcome adalah Pelaksanaan kegiatan berjalan baik
- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya hasil rapat secara optimal
- ✚ Indikator Impact adalah Koordinasi dapat berjalan lancar
- 11). *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 375.325.010,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 361.533.187,00 atau 96,33 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terciptanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi lainnya
- ✚ Indikator Outcome adalah Terlaksananya kerjasama yang baik antara Pemda, Pemerintah Pusat dan provinsi lainnya

- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya hubungan kerjasama antara Pemda, Pusat dan provinsi lainnya
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya Pendapatan Daerah

12). *Penyediaan jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Dengan jumlah dana sebesar Rp. 325.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 300.300.000,00 atau 92,40 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kesejahteraan aparatur
- ✚ Indikator Benefit adalah Terlaksananya pelayanan administrasi
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya tertib administrasi

13). *Penyediaan jasa keamanan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 821.942.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 810.572.200,00 atau 98,62 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya keamanan kantor
- ✚ Indikator Outcome adalah Meningkatnya keamanan kantor
- ✚ Indikator Benefit adalah Tertibnya suasana keamanan kantor
- ✚ Indikator Impact adalah Terwujudnya keamanan kantor

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

1). *Pembangunan gedung kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.613.719.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.546.541.100,00 atau 97,43 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terwujudnya gedung kantor yang baru
- ✚ Indikator Outcome adalah Terlaksana gedung kantor baru untuk pelaksanaan kerja yang baik

✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketentraman kerja dan pelayanan

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

2). *Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Dengan jumlah dana sebesar Rp. 980.550.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 850.928.600,00 atau 86,78 %.*

✚ Indikator Output adalah Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

✚ Indikator Outcome adalah Terlaksana Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

3). *Pengadaan Meubelair, Dengan jumlah dana sebesar Rp. 475.804.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 454.644.000,00 atau 95,55 %*

✚ Indikator Output adalah Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor

✚ Indikator Outcome adalah Terpeliharanya perlengkapan kantor

✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketentraman kerja dan pelayanan

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

4). *Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 657.400.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 620.128.560,00 atau 94,33 % .*

✚ Indikator Output adalah Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor

✚ Indikator Outcome adalah Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketentraman kerja

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

5). *Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.057.166.920,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 943.040.378,00 atau 89,20 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya pelayanan aparatur

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya pelayanan aparatur

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya disiplin aparatur

✚ Indikator Impact adalah Terpeliharanya kendaraan dinas / kantor

6). *Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 179.100.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 164.098.624,00 atau 91,62 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya kegiatan aparatur

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kebutuhan aparatur

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan aparatur

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya pelayanan aparatur

7). *Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 231.500.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 223.957.100,00 atau 96,74 %.*

✚ Indikator Output adalah Terwujudnya pemeliharaan kantor dan perlengkapannya

✚ Indikator Outcome adalah Terpeliharanya gedung kantor dan perlengkapan kantor

✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kenyamanan dan ketenangan kerja

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Pendidikan dan pelatihan formal Dengan jumlah dana sebesar Rp. 106.794.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 59.947.300,00 atau 56,13 %*

-  Indikator Output adalah Terlaksananya diklat aparatur
-  Indikator Outcome adalah Terpenuhinya kemampuan SDM
-  Indikator Benefit adalah Bertambahnya wawasan aparatur
-  Indikator Impact adalah Meningkatnya kemampuan aparatur

- 2). *Pembinaan mental dan fisik aparatur Dengan jumlah dana sebesar Rp. 145.550.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 134.530.000,00 atau 62,43 %*

-  Indikator Output adalah Terlaksananya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*
-  Indikator Outcome adalah Terpenuhinya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*
-  Indikator Benefit adalah Bertambahnya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*
-  Indikator Impact adalah Meningkatnya *Pembinaan mental dan fisik aparatur*

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dengan jumlah dana sebesar Rp. 62.850.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 39.685.000,00 atau 63,14 %.*

-  Indikator Output adalah Tersusunnya Penyusunan *laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*
-  Indikator Outcome adalah Terpenuhinya Penyusunan *laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya Penyusunan *laporan* kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya Penyusunan *laporan* kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2). *Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dengan jumlah dana sebesar Rp. 68.150.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 66.149.000,00 atau 97,06 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya laporan keuangan

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya pelayanan keuangan

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya administrasi keuangan

3). *Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dengan jumlah dana sebesar Rp. 89.769.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 82.174.000,00 atau 91,54 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Penyusunan Rencana Kerja SKPD*

✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya *Penyusunan Rencana Kerja SKPD*

✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya *Penyusunan Rencana Kerja SKPD*

✚ Indikator Impact adalah Tertibnya *Penyusunan Rencana Kerja SKPD*

e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 165.248.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 147.317.000,00 atau 89,15 %.

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Manajemen Asset/Barang Milik Daerah*

- ✚ Indikator Outcome adalah Terpenuhinya Asset/Barang Milik Daerah
- ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya Asset/Barang Milik Daerah
- ✚ Indikator Impact adalah Tertibnya Asset/Barang Milik Daerah

f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). *Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi Dengan jumlah dana sebesar Rp. 81.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 69.854.000,00 atau 85,97 %*
 - ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya susunan rencana Peraturan Daerah tentang pajak daerah & retribusi daerah
 - ✚ Indikator Outcome adalah Terwujudnya rencana peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
 - ✚ Indikator Benefit adalah Tersedianya payung hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah 4 perda
 - ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya PAD NTB
- 2). *intensifikasi penerimaan pajak daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 3.175.907.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.906.670.670,00 atau 85,97 %*
 - ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya koordinasi dan intensifikasi obyek retribusi daerah
 - ✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data obyek retribusi daerah
 - ✚ Indikator Benefit adalah Meningkatnya penerimaan retribusi daerah
 - ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan APBD untuk pelaksanaan pembangunan daerah
- 3). *Orientasi dan peningkatan teknis keSamsatan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 831.324.440,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 726.211.741,00 atau 87,36 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya program on line keSAMSATAN
- ✚ Indikator Outcome adalah Meningkatnya administrasi perpajakan
- ✚ Indikator Benefit adalah Terlaksananya penerimaan pajak daerah sesuai target
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

4). *Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor Dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.261.680.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.222.021.000,00 atau 96,86 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terinventarisasinya data kendaraan bermotor yang akurat
- ✚ Indikator Outcome adalah Tertibnya administrasi pungutan pajak kendaraan bermotor
- ✚ Indikator Benefit adalah Terjaringnya kendaraan bermotor belum memenuhi kewajiban

- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

5). *Konsultasi; Koordinasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan Dengan jumlah dana sebesar Rp. 343.622.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 334.347.520,00 atau 97,30 %*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya konsultasi, penyuluhan dan koordinasi
- ✚ Indikator Outcome adalah Laporan penerimaan hasil penyuluhan dan koordinasi
- ✚ Indikator Benefit adalah Koordinasi Dana perimbangan meningkat

- ✚ Indikator Impact adalah Penerimaan APBD meningkat

6). *Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Provinsi NTB dengan Instansi terkait Dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.933.700,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 208.666.450,00 atau 83,16 %.*

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Dipenda NTB dengan instansi terkait
- ✚ Indikator Outcome adalah Tersusunnya laporan perubahan dan penetapan target pendapatan daerah
- ✚ Indikator Benefit adalah Terwujudnya kesepakatan antar dinas terkait untuk memperoleh target pendapatan
- ✚ Indikator Impact adalah Peningkatan PAD

7). Koordinasi dan Sinkrinisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL
Dengan jumlah dana sebesar Rp. 52.220.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 48.686.000,00 atau 93,23 %

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkrinisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL.
- ✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya Data Koordinasi dan Sinkrinisasi Penerimaan Retribusi dan PPL
- ✚ Indikator Benefit adalah meningkatnya Penerimaan Retribusi dan PPL
- ✚ Indikator Impact adalah terselenggaranya Penerimaan Retribusi dan PPL

8). Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL Dengan
jumlah dana sebesar Rp. 55.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.643.800,00 atau 97,53 %

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya penyusunan realisasi penerimaan & evaluasi administrasi pemungutan retribusi & PLL
- ✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data realisasi penerimaan dan evaluasi administrasi pemungutan retribusi & PLL
- ✚ Indikator Benefit adalah Penerimaan retribusi dan PLL meningkat
- ✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD

9). *Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya Dengan jumlah dana sebesar Rp. 224.490.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 205.654.400,00 atau 91,61 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Intensifikasi obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya*.

✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data *obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya*.

✚ Indikator Benefit adalah *pertambahan obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya*.

✚ Indikator Impact adalah Meningkatnya penerimaan PAD dari sektor *Retribusi dan Pendapatan Lainnya*

10). *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL Dengan jumlah dana sebesar Rp 30.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.250.926,00 atau 97,50 %.*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL*.

✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL*.

✚ Indikator Benefit adalah *bertambahnya kemudahan Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL*.

✚ Indikator Impact adalah berkurangnya *tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL* serta Meningkatnya penerimaan PAD.

11). *Sosialisasi Pajak Daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 346.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 338.140.000,00 atau 97,73 %*

✚ Indikator Output adalah Terlaksananya *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL*.

✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data *Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL*.

✚ Indikator Benefit adalah *bertambahnya kemudahan*

Pengawasan tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL.

- ✚ Indikator Impact adalah berkurangnya tunggakan penerimaan Retribusi dan PPL serta Meningkatnya penerimaan PAD.

12). Aplikasi Retribusi dan PPL Dengan jumlah dana sebesar Rp. 108.190.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 89.436.000,00 atau 82,67 %

g. Program Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian Dengan jumlah dana sebesar Rp 203.860.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 200.450.539,00 atau 98,33 %.

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian.

- ✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian.

- ✚ Indik Benefit adalah meningkatnya disiplin PNS lingkup Dipenda Prov NTB.

- ✚ Indikator Impact adalah terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas aparatur Dipenda berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.

h. Program Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Management Asset/barang Daerah Dengan jumlah dana sebesar Rp. 57.200.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.930.000,00 atau 78,55 %

- ✚ Indikator Output adalah Terlaksananya Peningkatan Management Asset/barang Daerah.

- ✚ Indikator Outcome adalah Tersedianya data Peningkatan Management Asset/barang Daerah.

- ✚ Indik Benefit adalah meningkatnya tertib administrasi dan

pengetahuan aparaturnya dalam *Management Asset/barang Daerah*.

- ✚ Indikator Impact adalah berkurangnya kesalahan *pengelolaan Management Asset/barang Daerah*.

Keberhasilan pencapaian sasaran di atas merupakan wujud nyata dari peningkatan kinerja aparat Dinas Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pengelola pajak daerah telah menjalankan fungsinya selaku koordinator bidang pendapatan daerah yang didukung sarana dan prasarana yang baik, intensitas pengelolaan pendapatan daerah dengan seluruh unsur yang terkait disertai dengan peningkatan koordinasi semua pihak.

Meskipun pada aspek pencapaian kinerja keuangan masih mengalami penurunan dari tahun 2014 s/d 2015, namun pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 82.82%, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Retribusi daerah berada pada posisi terendah 1.18%. bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 6.26% (dalam urutan ketiga) setelah jenis komponen PAD yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua yaitu 9.75%, Dari urutan jenis pendapatan Pajak daerah.

Terhadap capaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tahun anggaran 2015. beberapa aspek penting pengukuran kinerja digunakan, baik berupa metode pengukuran kinerja yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang maupun metode-metode pengukuran kinerja lainnya yang secara objektif mengakomodir kesesuaian karakteristik pengukuran kinerja dimaksud dengan bertujuan menghasilkan kinerja yang terukur serta dapat

dijadikan sebagai barometer akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil kinerja ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus berupaya untuk senantiasa memperhatikan bagaimana Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang akan dibuat sehingga dapat dinilai efektivitas dan efisiensi dan digunakan untuk evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja periode berikutnya dalam rangka mempermudah proses manajerial guna pengambilan keputusan berupa kebijakan-kebijakan mana yang seperlunya akan diambil.

LAKIP DIPENDA NTB TA. 2015

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.

1. Terhadap Pencapaian Indikator pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 ditargetkan 13,64% dengan realisasi pertumbuhan 23,06 % atau melampaui penetapan target yang telah ditentukan hingga 9,42%.
2. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, membawa dampak terhadap pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2013 20,19% - tahun 2014 29,66% dan di tahun 2015 mencapai 11,70.
3. Berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2015, hasil dari pengukuran kinerja kegiatan tahun 2015 adalah = **702,73 % : 8 = 87,84 %** atau dalam kategori **(Sangat Berhasil)**.
4. Dari perhitungan Rasio efisiensi anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2015 **6,74%**, yang menunjukkan pengelolaan anggaran pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat **(Sangat Efisien)** dalam pengelolaan anggaran pendapatannya.
5. Rasio efektivitas pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 adalah 95,81 % yang berarti Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi Cukup efektif.

B. Langkah-Langkah Dimasa Depan.

Langkah penting yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sektor, dengan didukung oleh personil sebanyak 316 PNS yang terdiri dari 100

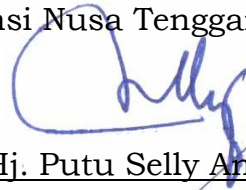
orang tenaga teknis (32,26%) dan 216 orang tenaga Administrasi (67,74%), kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun anggaran 2015 lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan berbagai inovasi dan perbaikan-perbaikan pada bidang pelayanan, sebagaimana telah ditempuh melalui pelayanan kendaraan oprasional samsat keliling, samsat week end dan samsat *drive thru*, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan menekan biaya ekonomi wajib pajak dalam pengesahan STNK setiap tahun yang dilaksanakan secara *ON LINE* pada seluruh UPTD PPDRD se-NTB.

2. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar terdorong dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditempuh melalui Kegiatan baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif. kegiatan yang bersifat preventif dimaksud dapat dilanjutkan melalui Sosialisasi Pajak Daerah dengan penyebar luasan ribuan lembar leaflet dan kegiatan yang bersifat preventif ditempuh melalui operasi penertiban kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada seluruh kantor Samsat UPTD-PPDRD se-NTB.
3. Mengoptimalkan kerjasama dalam upaya menjaga keseimbangan dan keselarasan pengelolaan Pendapatan dengan Mitra kerja dan instansi pengelola PAD.
4. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah dan peningkatan Pelayanan Masyarakat khususnya terhadap wajib Pajak Daerah.

Akhir kata, seyogianya laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada segenap pihak (*stakeholders*) dan sejatinya dapat menjadi informasi dalam membuat kebijakan serta pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Mataram, Februari 2016

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Dra. Hj. Putu Selly Andayani M.Si.

NIP. 19610915 199303 2 001

LAKIP DIPENDA NTB TA. 2015